

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA
DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ZULECHA ARISKIA
NIM. 4317040

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA
DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ZULECHA ARISKIA
NIM. 4317040

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulecha Ariskia**
NIM : **4317040**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Di Kecamatan Bojong**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini sudah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Zulecha Ariskia

NIM : 4317040

NOTA PEMBIMBING

Ade Gunawan, M.M

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zulecha Ariskia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Zulecha Ariskia**

NIM : **4317040**

Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bojong**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Oktober 2021
Pembimbing,



Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan, No. 52 Kajen Pekalongan

Website : www.febi.iainpekalongan.ac.id | Email : febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Zulecha Ariskia**
NIM : **4317040**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bojong**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Ahmad Rosvid, S.E., M.Si.
NIP. 197903312006041003


Ria Anisatus Sholihah, M.S.A.
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 11 November 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Sinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

ABSTRAK

ZULECHA ARISKIA, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dan Adesa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bojong.

Desa bertanggung jawab melaksanakan sistem akuntabilitas untuk mencapai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat atas keberadaan dana desa. Kebijakan tersebut tercantum dalam dalam UU No. 6 Tahun 2014. Permasalahan yang muncul dari akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu terkait dengan kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan data dikumpulkan dengan dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang bekerja di kantor desa kecamatan Bojong. teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 11 desa dengan jumlah responden sebanyak 66 orang. Hipotesis diuji dengan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar $1,922 < 2,005$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,060 > 0,05$. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar $4,258 > 2,005$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien uji t sebesar $1,049 < 2,005$ dan tingkat signifikansi sebesar $2,99 > 0,05$. Koefisien determinasi 0,434 Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu: kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) dijelaskan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah 43,4%. Sedangkan sisanya 56,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

Kata Kunci: kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa

ABSTRACT

ZULECHA ARISKIA. The Effect of Competence of Village Fund Management Officers, Utilization of Information Technology and Community Participation of the Accountability of Village Fund Management in Kecamatan Bojong

The village is responsible for implementing an accountability system to achieve the principles of good governance as well as improving services and empowering the community for the existence of village funds. The policy is stated in Law no. 6 of 2014. Problems that arise from the accountability of village fund management are related to the competence of village fund management officials, the use of information technology and community participation. This study aims to examine the effect of the competence of village fund management officers, the use of information technology and community participation on the accountability of village fund management in Bojong District, Pekalongan Regency.

This type of research is quantitative and data is collected by using a research instrument in the form of a questionnaire. The population in this study were all village officials who worked in village offices in the bojong sub-district. The sampling technique used was purposive sampling so that a total sample of 11 villages was obtained with a total of 66 respondents. The hypothesis was tested by multiple linear regression analysis with SPSS application.

The results of this research data indicate that the competence of the apparatus does not have a positive and significant effect on the accountability of village fund management with a t-test coefficient value of $1.922 < 2.005$ and a significance level of $0.060 > 0.05$. The use of technology has a positive and significant effect on the accountability of village fund management with a t-test coefficient value of $4.258 > 2.005$ and a significance level of $0.00 < 0.05$. Community participation has no positive and significant effect on village fund management accountability with a t-test coefficient value of $1.049 < 2.005$ and a significance level of $2.99 > 0.05$. The coefficient of determination is 0.434. This indicates that the influence of the independent variables, namely: competence of village fund management apparatus, utilization of information technology and community participation on the dependent variable (accountability for village fund management) is explained by the equation model in this study is 43.4%. While the remaining 56.6% is explained by other factors not included in this model.

Keywords : competence of village fund management officers, the technology information utilization, the society participation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh Karen aitu, saya mengucapkan terima kasih banyak.

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati S.H, M.H selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
2. Dr. Tamamudin S.E, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
3. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Ria Anisatus Sholihah, MSA., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ade Gunawan, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muhammad Nasrullah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

7. Bapak Alif Nurfiyanto, S.IP selaku camat Bojong yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah pemerintahan desa di Kecamatan Bojong
8. Kepala desa di kecamatan Bojong yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di desanya serta para perangkat desa yang telah berkenan membantu peneliti dalam mengisi kuesioner penelitian.
9. Orang tua dan keluarga tercinta Ibu Musanah, Bapak Chaerul Anwar, adekku Ajeng Nisa, kakaku Diah Irma dan keponakanku Dilfa Najwa yang telah memberikan bantuan dukungan baik material maupun moral.
10. Sahabat dan teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Diri saya sendiri terimakasih sudah mau berjuang hingga sampai pada titik ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Oktober 2021



Zulecha Ariskia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Stewardship	11
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	12
3. Kompetensi Aparat Desa.....	15
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	16
5. Partisipasi Masyarakat.....	17

B. Telaah Pustaka.....	19
C. Kerangka Berpikir	25
D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	33
B. Setting Penelitian.....	33
C. Objek Dan Subjek Penelitian.....	33
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	34
1. Populasi	34
2. Sampel	34
E. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	36
1. Variabel Penelitian	36
2. Definisi Operasional.....	37
F. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Kuesioner	40
2. Studi Pustaka	41
H. Metode Analisis Data	41
1. Uji Instrument	41
2. Uji Asumsi Klasik	42
3. Uji Regresi Linear Berganda.....	44
4. Pengujian Hipotesis.....	44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Responden Penelitian.....	47
2. Analisis Data Deskriptif.....	52
3. Analisis Data	62
B. Pembahasan.....	77

1. Pengaruh Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	77
2. Pengaruh Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	80
3. Pengaruh Variabel Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	83
4. Pengaruh Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	86
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan.....	88
B. Keterbatasan Penelitian	89
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	I
Lampiran I	I
Lampiran II.....	II
Lampiran III	III
Lampiran IV	VI
Lampiran V	XII
Lampiran VI	XVI
Lampiran VII	XXVII
Lampiran VIII	XXIX
Lampiran IX	XXXV
Lampiran X	XXXVI
Lampiran XI	XL I
Lampiran XII	XLII
Lampiran XIII	XLIV

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
‘ain	ع	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي . . °	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و . . °	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
ذَكَرَ	zukira
يَذْهَبُ	yazhabu
سُئِلَ	su`ila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا . . ° ي . . °	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي . . °	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و . . °	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnahal-munawwarah al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbana
نَزَّلَ	nazzala

الْبِرُّ al-birr

الْحَجَّ al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

السَّيِّدُ as-sayyidu

الشَّمْسُ as-syamsu

القَلَمُ al-qalamu

البَدِيعُ al-badiu

الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuẓu
النَّوْءُ	an-nau'u
شَيْئٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Telaah Pustaka, 21
Table 3.1	Data Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Bojong Tahun 2020, 35
Tabel 3.2	Definisi Operasional, 37
Tabel 3.3	Skala <i>Likert</i> , 40
Tabel 4.1	Distribusi Kuesioner, 47
Tabel 4.2	Data Distribusi Penyebaran Kuisisioner, 48
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 49
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, 49
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir, 50
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja, 51
Tabel 4.7	Distribusi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, 52
Tabel 4.8	Distribusi Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, 54
Tabel 4.9	Distribusi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat, 57
Tabel 4.10	Distribusi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 59
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas, 62
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas, 64
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas Metode <i>Kolmogorov Smirnov</i> , 65
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas, 67
Tabel 4.15	Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Koefisien Korelasi Rank <i>Spearman's Rho</i> , 68
Tabel 4.16	Hasil Uji Linearitas, 70

Tabel 4.17	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda, 70
Tabel 4.18	Hasil Uji t, 73
Tabel 4.19	Hasil Uji f, 75
Tabel 4.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi, 76

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berpikir, 25
- Gambar 4.1 Grafik Normal Probability Plot, 66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian Dari Jurusan, I
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian Dari Kecamatan, II
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, III
- Lampiran 4 Kuesioner Penelitian, VI
- Lampiran 5 Data Responden Penelitian, XII
- Lampiran 6 Data Hasil Penelitian, XVI
- Lampiran 7 Analisis Statistika Deskriptif, XXVII
- Lampiran 8 Hasil Uji Validitas, XXIX
- Lampiran 9 Hasil Uji Reliabilitas, XXXV
- Lampiran 10 Hasil Uji Asumsi Klasik, XXXVI
- Lampiran 11 Hasil Uji Hipotesis, XLI
- Lampiran 12 Dokumentasi, XLIII
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup, XLIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu komunitas hukum yang paling kecil dan perkembangannya mengikuti perkembangan sejarah masyarakat Indonesia, yang dimana desa ini sudah melekat di dalam tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia (Kemenkeu, 2017). Kebijakan yang tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk pengakuan desa secara nasional, dimana kebijakan tersebut juga menjadi bentuk kebijakan untuk mengawasi desa (Kemenkeu, 2017). Sasaran yang diharapkan dari diundangkannya undang-undang tersebut ialah guna menciptakan pemerintah desa yang bekerja lebih profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan rencana pemerintah, desa mengemban tanggung jawab saat mengelola sumber daya yang tersedia pada tiap-tiap desa untuk mempercepat peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, desa juga bertanggung jawab melaksanakan sistem akuntabilitas untuk mencapai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat atas keberadaan dana desa tersebut (Irma, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah bentuk dari bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah pusat dan masyarakat untuk menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan setiap kegiatan yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah pada dasarnya akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap kegiatan, dan masyarakat akan mendukung kegiatan yang dilakukan (Jorge, Sá, Pattaro, & Lourenço, 2011). Dijelaskan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2015 bahwa penerapan akan prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tata pemerintahannya yang dimana pada seluruh akhir kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa wajib dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa seperti pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Supaya dapat menunjang terlaksananya program desa, tentunya diperlukan kompetensi di dalam sumber daya yang terdapat pada diri aparat desa dimana sumber daya tersebut bisa menjalankan tugas. Pemerintah desa seharusnya mempunyai tenaga yang bertugas dalam mengelola keuangan desa dimana dapat membuat laporan keuangan secara andal guna meningkatkan akuntabilitas keuangan tingkat desa. Menurut (Medianti, 2018) kompetensi merupakan kemampuan yang dapat memotivasi aparat desa untuk terus mengetahui seluk beluk dalam tata cara pengelolaan dana pada tingkatan desa agar jauh lebih tepat lagi. Apabila aparat desa tidak memiliki pemahaman akan hal tersebut, maka akan terjadi serangkaian kesalahan dalam menyusun laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan tidak konsisten antara laporan yang dibuat terhadap standar yang sudah pemerintah tetapkan, yang akan membuat informasi yang didapatkan publik tidak lagi akurat dan berdampak pada keputusan yang akan dibuat nantinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Agustiningsih, Taufik, & Indrawati, 2020).

Pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat desa serta dapat melakukan sejumlah pengelolaan terhadap dana desa dengan optimal. Aparat desa dituntut agar dapat menggunakan teknologi informasi supaya lebih memudahkan dan memperlancar pekerjaan yang dijalankannya. Aswandi mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat diproses dengan cepat (Aswandi, 2018). Yang dimana menggunakan sistem dengan memanfaatkan program komputer, maka dana desa yang dilaporkan akan bisa dirampungkan dalam waktu yang relatif cepat serta lebih mudah dilakukan. Melalui aktivitas mengkomputerisasikan laporan maka output laporan akan lebih handal apabila dibandingkan dengan menyusun laporan secara manual (Perdana, 2018).

Dalam mengelola keuangan desa, masyarakat akan berperan dalam mengawasi pengalokasian dana yang didapatkan dari bantuan pemerintah pusat sehingga masyarakat dapat mengetahui seberapa jauh pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyalurkan dana desa yang berhasil dididapkannya (Zulkifli, Sulaiman, Wahyudi, & Martini, 2020). Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka potensi penyimpangan yang dilakukan aparat desa dalam mengelola dana desa juga dapat diantisipasi serta pengalokasian dana akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020). Diungkapkan juga oleh (Aulia, 2018) bahwa peran partisipasi masyarakat dapat secara efektif, efisien dan akuntabel meningkatkan kinerja pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 terkait Pengelolaan Dana Desa untuk mengatur proses mengelola dana desa diawali dengan tahapan menyusun rencana, membuat laporan, dan juga mempertanggungjawabkan. Dana untuk pembangunan desa telah dianggarkan oleh pemerintah, dengan jumlah yang besar, pemerintah pusat berharap kebijakan terbaru dapat diterapkan dengan jauh lebih baik lagi. Total dana desa yang tersalurkan sepanjang 2015-2020 sebesar Rp. 329,75 triliun. Tiap tahunnya pemerintah terus meningkatkan dana yang dianggarkan kepada desa. Dengan dana tersebut pelayanan publik di desa diharapkan akan jauh lebih meningkat, kemiskinan yang melanda di desa dapat terus ditekan, perekonomian desa akan terus berkembang, serta kesenjangan pembangunan antar desa dapat teratasi dengan baik (BPKP, 2018).

Suatu hal yang peneliti pertimbangkan di dalam riset ini ialah terdapatnya temuan atas hasil evaluasi dari pemanfaatan dana desa, misal dana desa dimanfaatkan di luar program yang menjadi prioritas, pengeluaran dana desa yang tidak mampu dibuktikan secara konkret, pekerjaan terkait sarana dan juga prasarana dikerjakan bukan oleh pihak kedua atau pihak yang menyediakan jasa, pengeluaran selain APBDes (Kemenkeu, 2017). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah menjumpai 25 kasus berkaitan dengan dana desa di 12 desa di Jawa Tengah dari Juni 2017 hingga Oktober 2018. Berdasarkan temuan tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan yang dalam mengelola dana desa, seperti penyalahgunaan kewenangan kepala desa, korupsi terhadap dana desa, surat pertanggungjawaban (SPJ) palsu, serta

mutu beserta dengan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak memenuhi persyaratan (Rmoljateng, 2018).

Kabupaten Pekalongan termasuk ke dalam kabupaten yang letaknya di provinsi Jawa Tengah. Dalam penyelenggaraan dana desa pada tahun 2018-2019 terdapat oknum kepala desa di kabupaten Pekalongan yang berurusan dengan penegak hukum. Hal ini terkait dengan masalah penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Kecamatan Bojong ialah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Kasus penyelewengan dana desa yang mana dilakukan oleh seorang kepala desa di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yaitu ia telah menggelapkan dana kas desa sebesar Rp 521.028.190. Dana yang seharusnya menjadi kas desa yang berasal dari kompensasi pembangunan jalan tol tersebut tidak jelas pertanggungjawabannya (Bernardi, 2018). Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan belum dioptimalkan dengan baik dan tepat.

Selain hal diatas merujuk kepada laporan yang memperlihatkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 53C/LHP/XVIII.SMG/05/2019, tertanggal 22 Mei 2019, pengujian atas ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa menunjukkan bahwa terdapat desa yang terlambat dan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Keterbatasan kemampuan perangkat desa menjadi salah satu faktor penyebab desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (Klikanggaran.com, 2020). Diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa harus disampaikan kepada bupati secara

tepat waktu, jika tidak hal ini akan memperlambat proses pencairan dana desa tahap berikutnya.

Adapun persoalan penyalahgunaan dana desa menunjukkan bahwa akuntabilitas ini diperlukan sebagai bentuk kewajiban aktivitas dalam mencapai sasaran atau target dari dibentuknya kebijakan ataupun program agar jauh lebih efektif. Banyaknya temuan kasus terkait pengelolaan dana desa yang disalahgunakan oleh aparat desa, maka diperlukan sebuah regulasi untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan dana desa guna menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Krisnawati, Yuniarta, & Sulindawati, 2020).

Didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (An-Nisa [4] : 58)

Ayat tersebut mengandung perspektif islam terhadap makna akuntabilitas yaitu menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas merupakan wujud pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan amanahnya serta masyarakat yang berhak memperoleh pertanggungjawaban dan memperoleh informasi atas bagaimana dana desa dikelola.

Penelitian terdahulu yang dijalankan oleh (Aulia, 2018) memperlihatkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintah desa serta keikutsertaan masyarakat menunjukkan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan DD. Sedangkan riset yang dijalankan oleh (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017) mengemukakan bahwa kompetensi tidak memperlihatkan pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Lalu riset yang dijalankan (Karyadi, 2019) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Dan riset yang dijalankan oleh (Mudarosatun, 2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat tidak memperlihatkan terdapatnya pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Perbedaan hasil dan ketidakkonsistenan pada riset terdahulu serta berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penulis meyakini perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang saat ini tengah terjadi. Sehingga peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bojong”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat memiliki pengaruh secara positif dan signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna memperoleh suatu informasi terkait pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Guna memperoleh suatu informasi terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Guna memperoleh suatu informasi terkait pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Guna memperoleh informasi terkait pengaruh yang kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintahan desa, hasil yang diperoleh pada riset ini peneliti harapkan bisa dijadikan sebagai sebuah saran bagi aparat desa saat menyelenggarakan pemerintahan, khususnya kepala desa ketika membentuk kebijakan yang mana ditujukan supaya bisa mengetahui

proporsi akuntabilitas dalam mengelola dana desa secara maksimal optimal untuk menunjang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat

- b. Bagi masyarakat, riset ini menghasilkan sesuatu yang bisa menjabarkan informasi bagi masyarakat berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa guna mendapatkan informasi terkait potensi dari desa tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi riset selanjutnya dan juga sebagai referensi penelitian sehingga penelitian selanjutnya dapat mengetahui secara lebih mendalam terkait pengaruh kompetensi aparat dan Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas laporan dana desa.

E. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini akan dipaparkan problem yang melatarbelakangi penelitian, rumusan atas permasalahan yang melatarbelakangi dilangsungkannya penelitian, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penulisan dan juga sistematika dalam membahas permasalahan yang melatarbelakangi penelitian.

2. BAB II Landasan Teori

Di dalam bab ini terkandung sejumlah teori yang dapat diterapkan guna memperkuat penelitian, dimana kemudian dilanjutkan dengan membentuk kerangka berpikir serta membentuk hipotesis.

3. BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan berbagai tahapan pengetahuan mengenai metode yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian. Terdiri atas sub-sub jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variable penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan langkah dan hasil penganalisisan data.

5. BAB V Penutup

Bab ini akan berisi simpulan atas hasil yang sudah dilakukan pembahasan dalam bab sebelumnya, serta ditambahkan sejumlah saran yang tujuannya dapat memberikan solusi terhadap masalah yang peneliti teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji mengenai pengaruh dari kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong. Merujuk hasil pengujian yang sudah dijalankan dengan cara menerapkan model regresi linear berganda dengan SPSS Versi 25, maka dapat didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel kompetensi aparat pengelola dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.060 \geq 0.05$ dan $t_{hitung} (1,992) < t_{tabel} (2,005)$.
2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan $t_{hitung} (4,258) > t_{tabel} (2,005)$
3. Variabel partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.299 \geq 0.05$ dan $t_{hitung} (1,049) < t_{tabel} (2,005)$
4. Variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat secara simultan dan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan

Bojong kabupaten Pekalongan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai f_{hitung} (15,332) $>$ f_{tabel} (2,78) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Populasi penelitian ini terbatas hanya di satu kecamatan serta menggunakan teknik purposive sampling dalam penarikan sampel nya.
2. Peneliti hanya menggunakan 3 variabel bebas yakni kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat untuk diujkan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Data yang digunakan terbatas hanya berupa kuesioner tanpa disertai data primer lain berupa hasil wawancara.

C. Saran

1. Bagi pemerintah desa, didasarkan pada hasil analisis yang sudah dijabarkan sebelumnya, untuk bisa mendorong peningkatan akan akuntabilitas dari dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa harus melakukan peningkatan terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan supaya kinerjanya juga dapat meningkat dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan karena lebih akurat dan tepat. Misalnya mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikas tersebut dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Yaitu ketika pengguna melakukan proses input berdasarkan transaksi yang ada maka output yang dihasilkan dalam bentuk dokumen administrasi dan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah lokasi studi yaitu tidak hanya di satu kecamatan, tetapi lebih baik lagi dapat menambah jumlah kecamatan untuk diteliti dan juga diharapkan dapat menambah variable lain diluar penelitian ini yang menjadi faktor- faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Misalnya sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan ketaatan pelaporan keuangan. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak hanya menyebar kuesioner saja tetapi juga diikuti dengan wawancara secara langsung kepada responden agar lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, M., Taufik, T., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91.
- Alaudin, Fauzi C. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, Sri Devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding*, (2017), 978–979.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Pr*.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM-FEB*, 53(9), 1689–1699.
- Bernardi, R. (2018). Kades Ini Dilaporkan Tilep Rp 0,5 M Dana Kompensasi Proyek Tol. Diambil 29 Maret 2021, dari [news.detik.com website: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4272658/](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4272658/)
- bpkp. (2018). Desa Merupakan Ujung Tombak Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat. Diambil 2 April 2021, dari <http://www.bpkp.go.id/jateng/berita/read/20932/105/>

- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Cetak* (Cetakan pe). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (2004). Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition. *Human Resource Management Review*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.001>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idward, N. N. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderisasi (Vol. 13). UIN Alaudin Makassar.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Jorge, S. M., Sá, P. M., Pattaro, A. F., & Lourenço, R. P. (2011). *Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants*. Ghent, Belgium.: Paper presented at 13 Biennial CIGAR Conference.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (hal. 7).
- Klikanggaran.com. (2020). Kab. Pekalongan: Dana Desa Sebesar Rp9.202.508.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan. Diambil 1 April 2021, dari <https://klikanggaran.com/anggaran/kab-pekalongan-dana-desa-sebesar-rp9-202-508-00000-belum-dipertanggungjawabkan.html>

- Krisnawati, L. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11 No. 2(1), 22–32.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desadalam Program DesaSiaga Di Desa Bandung Kecamatan PlayenKabupaten Gunung KidulProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1*, 277–283.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik (IV)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemodesari (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat). *Jom Feb, 1(Dd)*.
- Mudarosatun, N. I. (2017). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi, 4*, 9–15.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal, 2(2)*, 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS (cet-1; Puput Cahya Ambarwati, Ed.)*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian (Cetakan I; Syahrani, Ed.)*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan akuntabilitas publik (Arie Prame)*. Yogyakarta.

- Rmoljateng. (2018). BPK Jawa Tengah Telisik 25 Kasus Dana Desa. Diambil 29 Maret 2021, dari [rmoljateng.com](http://www.rmoljateng.com) website: <https://www.rmoljateng.com/read/2018/12/15/15025/>
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya)*. (3), 580–590.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (22 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. . . (2015). *Akuntansi Sektor publik* (Cetakan 20; Mona, Ed.). Yogyakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. Diambil dari <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4, 2021.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Zulkifli, Sulaiman, Wahyudi, R., & Martini, R. (2020). Peran Kompetensi, Komitmen, Dan Partisipasi Masyarakat Bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, 6(2), 106–113.